



ANALISIS PENGARUH BELANJA DAERAH DAN PDRB TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KALIMANTAN BARAT

Dina Rizky Ramadhani¹, Widya Nur Fadila², Nita Safira³

^{1,2}Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat,

³Sekretariat Direktorat Jenderal

Alamat Korespondensi: dina.ramadhani@kemenkeu.go.id

Abstract

The increase in local own-source revenue, as one of the sources of the district's funding, is influenced by local economic activities, which are reflected in the value of gross regional domestic product (GRDP). Local government expenditure, as stated in the regional government budget, also becomes one of many factors contributing to the increase in local own-source revenue. That is because the consumption of local government expenditure will enhance the local economic activities. This study examines the effect of GRDP and local government spending on the increase in local own-source revenue in Kalimantan Barat. The data used in this study consisted of 140 data taken from 14 districts/cities within Kalimantan Barat in 10 years (2013-2022) and analyzed using the random effect model (REM) panel data regression model. The results showed that GRDP and local government expenditure significantly affect local own-source revenue in Kalimantan Barat.

On the other hand, GRDP and local government expenditures significantly increase local own-source revenue in Kalimantan Barat on a partial basis. Based on the study, researchers recommend that to increase local own-source revenue through the economy (GRDP), the government needs to carry out economic transformation by focusing on optimizing industrial estates. The government must also increase allocations on productive local government expenditures such as capital expenditure and immediately issue regional regulations regarding regional taxes.

Abstrak

Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pendanaan daerah dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian masyarakat yang tercermin melalui nilai pendapatan domestik regional bruto (PDRB). Belanja daerah dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) juga menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi peningkatan PAD, karena realisasi belanja daerah akan meningkatkan perekonomian di daerah. Penelitian ini meneliti pengaruh PDRB dan belanja daerah terhadap peningkatan PAD di Kalimantan Barat. Data dalam penelitian ini terdiri dari 140



data yaitu 14 daerah Kabupaten/Kota lingkup Kalimantan Barat yang diambil dalam rentang sepuluh tahun (2013-2022) dan dianalisis menggunakan model regresi data panel *random effect model* (REM), menurut temuan penelitian PDRB dan belanja daerah secara parsial dan bersama-sama berdampak besar pada PAD di Kalimantan Barat. Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti merekomendasikan bahwa untuk meningkatkan PAD melalui perekonomian (PDRB), pemerintah perlu melakukan transformasi ekonomi dengan berfokus pada optimalisasi kawasan industri. Pemerintah juga perlu meningkatkan alokasi pada belanja daerah yang produktif seperti belanja modal dan segera menerbitkan peraturan daerah tentang pajak daerah.

Keywords: Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

JEL Classification: H500, H720, O43

PENDAHULUAN

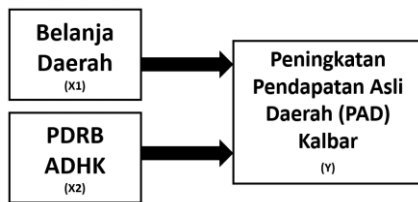
Pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan kuantitatif dalam proses produksi barang dan jasa pada wilayah tertentu dan pada periode tertentu diukur dengan menggunakan parameter seperti produk domestik bruto (PDB) untuk level nasional dan produk domestik regional bruto (PDRB) untuk level daerah.

Pertumbuhan ekonomi umumnya dipengaruhi oleh empat hal yaitu konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, pengeluaran investasi, dan net ekspor-impor. Pengeluaran/belanja yang dilakukan oleh pemerintah memengaruhi pertumbuhan ekonomi karena merupakan salah satu nilai tambah dalam perhitungan PDRB. Ini sejalan dengan teori kebijakan fiskal, yang menyatakan bahwa pemerintah turut mengontrol pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pengeluaran dan belanja pemerintah yang dialokasikan melalui APBN dan APBD. Pelayanan dasar masyarakat, kesehatan, fasilitas sosial, pendidikan, dan umum yang memadai serta pembentukan sistem jaminan sosial adalah tanggung

jawab daerah yang dipenuhi dengan belanja pemerintah. Belanja pemerintah juga digunakan untuk membiayai program, proyek, layanan publik, subsidi, dan infrastruktur yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah dijelaskan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan seberapa besar pengaruh dan pentingnya pertumbuhan ekonomi diukur melalui PDRB dan belanja daerah. Penelitian ini menggunakan PDRB atas harga dasar konstan (ADHK). ADHK digunakan untuk menyesuaikan dampak atas inflasi dan memperoleh gambaran yang lebih akurat tentang pertumbuhan ekonomi tanpa distorsi harga. Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang pengaruh belanja daerah dalam APBD dan pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari nilai PDRB terhadap PAD di Kalimantan Barat serta memberi rekomendasi kebijakan ekonomi daerah dan kebijakan fiskal melalui instrumen

Gambar 1 Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah Peneliti

belanja daerah dalam APBD untuk peningkatan PAD.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu dugaan awal yang memerlukan pengujian empiris untuk memastikan kebenarannya. Dalam kerangka penelitian ini seperti Gambar 1, hipotesisnya adalah:

- H0 = Belanja daerah dan PDRB tidak berpengaruh terhadap peningkatan PAD Kalimantan Barat tahun 2013-2022
- Ha1 = Belanja daerah berpengaruh terhadap peningkatan PAD Kalimantan Barat tahun 2013-2022
- Ha2 = PDRB berpengaruh terhadap peningkatan PAD Kalimantan Barat tahun 2013-2022

TINJAUAN LITERATUR

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan suatu instrumen yakni APBD. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan melalui peraturan daerah. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta evaluasi pengelolaan keuangan daerah

diatur oleh APBD. Pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah diperhitungkan dalam APBD.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan daerah didefinisikan oleh UU HKPD sebagai seluruh hak daerah selama satu tahun anggaran yang menambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah ini mencakup PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (LLPDyS).

PAD adalah penerimaan yang diperoleh suatu wilayah secara sah sesuai dengan hukum dan peraturan setempat. PAD berperan sebagai bagian dari proses desentralisasi dengan tujuan untuk memberi wewenang kepada pemerintah daerah dalam hal pembiayaan terkait pelaksanaan otonomi daerah dengan menyesuaikan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Dengan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan mereka secara mandiri, PAD sangat membantu memperkuat proses desentralisasi di Indonesia.

Pembentuk PAD termasuk pajak dan retribusi daerah (PDRD), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan daerah yang sah lainnya. Dalam konsep otonomi daerah, PAD seharusnya menjadi sumber utama penghasilan yang berkontribusi terhadap performa keuangan daerah. Pemerintah daerah pastinya membutuhkan dana untuk mendukung berbagai kegiatan yang bertujuan memperbaiki mutu layanan dan meningkatkan kesejahteraan warga setempat. Oleh karena itu, optimalisasi PAD perlu dilakukan oleh pemerintah

daerah guna mendanai pengeluaran dan belanja daerah, sehingga tingkat kemandirian daerah dapat meningkat dan ketergantungan terhadap dana transfer pusat menurun.

Belanja Daerah dalam APBD

Belanja daerah, menurut definisinya, mengacu pada seluruh kewajiban daerah untuk mengurangi nilai kekayaan bersih selama periode anggaran tertentu. Belanja operasi, tidak terduga, modal, dan transfer adalah beberapa pos dalam belanja daerah. Belanja operasi terdiri dari beberapa jenis, termasuk biaya pegawai, barang dan jasa, subsidi, bunga, bantuan sosial, dan hibah.

Belanja daerah menjadi alat penting dalam manajemen fiskal di tingkat daerah yang membantu dalam alokasi dana untuk berbagai keperluan pemerintah daerah. Alokasi dan pengelolaan belanja daerah adalah aspek kunci dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pemerintah di tingkat daerah. Belanja daerah digunakan pemerintah daerah dalam rangka menjalankan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan dan pelayanan publik di wilayahnya.

Belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat menjadi satu di antara banyak faktor yang berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan. Belanja operasional dan modal pemerintah daerah dapat meningkatkan ekonomi lokal, yang kemudian meningkatkan pendapatan melalui pajak dan retribusi. Purnomo (2015) menyatakan bahwa peningkatan PAD sangat dipengaruhi oleh belanja modal dan pengeluaran barang dan jasa. Sebaliknya, PAD tidak terpengaruh secara signifikan oleh pengeluaran

pegawai dan transfer pemerintah daerah.

Pertumbuhan Ekonomi & PDRB

Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah dalam satu tahun, harus membandingkan jumlah PDRB berjalan dengan PDRB tahun sebelumnya. PDRB menggambarkan akumulasi dari nilai tambah produksi pada suatu regional atau wilayah yang timbul dari beragam lapangan usaha atau sektor tanpa memilih faktor produksi (Arsyad, 1992). Konsumsi/pengeluaran rumah tangga (C), pengeluaran investasi (I), dan total ekspor-impor adalah empat komponen PDRB. Apabila dihitung menggunakan pendekatan pengeluaran, konsumsi pemerintah merupakan salah satu komponen dalam perhitungan PDB/PDRB. Belanja konsumsi pemerintah terdiri dari sejumlah elemen, seperti transfer (non barang modal), belanja pegawai, belanja sosial, dan belanja barang dan jasa.

Dengan menggunakan indikator harga yang berlaku saat ini (ADHB) dan ADHK, PDRB merupakan salah satu parameter penting dalam mengevaluasi dan menilai keadaan ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode. Nilai tambah barang dan jasa yang dicerminkan melalui ADHB dihitung dengan harga saat ini. Sebaliknya, ADHK menghitung nilai tambah berdasarkan harga dasar tahun tertentu. PDRB pada harga berlaku berguna untuk mengevaluasi kapasitas sumber daya ekonomi, perubahan, dan struktur ekonomi suatu wilayah. Sebaliknya, PDRB digunakan pada harga konstan untuk menilai pertumbuhan ekonomi riil dari tahun ke tahun tanpa dipengaruhi oleh fluktuasi harga.

Peningkatan PDRB menjadi parameter sangat penting yang menandai efektivitas pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Peluang untuk meningkatkan penerimaan daerah dapat meningkat seiring dengan peningkatan PDRB daerah bersangkutan. Peningkatan tersebut berkaitan dengan peningkatan pendapatan penduduk di wilayah tersebut (Simanjuntak, 2001). Pertambahan pendapatan penduduk mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Sebagai alat analisis, model regresi data panel diimplementasikan melalui aplikasi *Eviews 10*. *Eviews* adalah perangkat lunak statistik yang digunakan untuk menganalisis data ekonometrik, terutama data runut waktu atau *time series*, serta berperan sebagai sarana komunikasi dalam proses analisis.

Objek penelitian melingkupi 14 daerah kabupaten dan kota lingkup Kalimantan Barat dalam rentang sepuluh tahun (2013-2022), sehingga terdapat

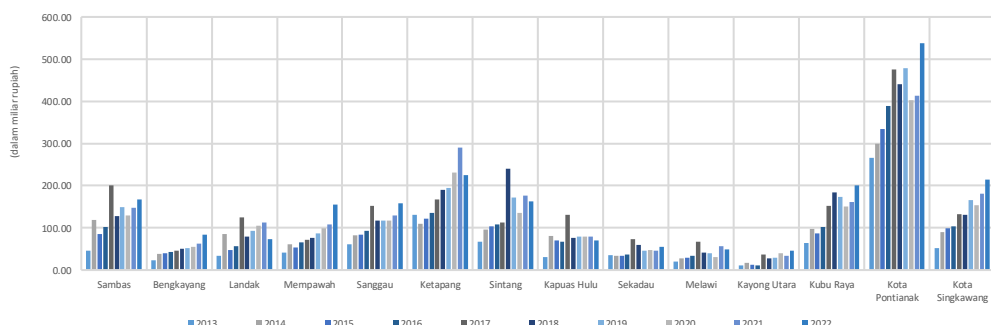
140 data menggunakan total *sampling* (data selengkapnya terlampir). Penelitian melibatkan tiga variabel, yaitu satu variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi (Y) dan dua variabel independen atau variabel yang memberikan pengaruh (X). Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu PAD, diperoleh dari laporan realisasi anggaran (LRA) masing-masing pemerintah daerah yang dihimpun melalui aplikasi sistem informasi keuangan daerah (SIKD) milik Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Kementerian Keuangan. Sedangkan variabel independen sebagai variabel yang memengaruhi, yaitu PDRB ADHK kabupaten/kota dan belanja daerah dalam APBD.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tren PAD Kalimantan Barat Tahun 2013-2022

Grafik 1 menunjukkan peningkatan PAD kabupaten/kota Kalimantan Barat dari 2013 hingga 2022. PAD kabupaten/kota dari 2013 hingga 2022 rata-rata sebesar Rp116,47 miliar,

Grafik 1 Tren PAD Kabupaten/Kota
Lingkup Kalimantan Barat Tahun 2013-2022



Sumber: LRA Pemda Kab/Kota Kalimantan Barat, SIKD DJPK (diolah peneliti)

dengan PAD tertinggi sebesar Rp2.199,15 miliar pada tahun 2022. Rata-rata PAD tertinggi di Kalimantan Barat selama kurun waktu 2013-2022 terdapat di Kota Pontianak yaitu sebesar Rp403,77 miliar per tahun dan terendah di Kabupaten Kayong Utara dengan rata-rata penerimaan PAD sebesar Rp26,48 miliar per tahun.

PAD Kalimantan Barat rata-rata meningkat setiap tahun sebesar 11,94% dari 2013 hingga 2022. Dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 44,33% pada tahun 2017 dan penurunan terkecil sebesar 5,44% pada tahun 2020. Apabila dilihat lebih rinci per kabupaten/kota rata-rata pertumbuhan PAD selama kurun waktu 2013-2022 tertinggi terdapat di Kabupaten Kayong Utara yaitu tumbuh sebesar 32,47% setiap tahunnya. Sedangkan rata-rata pertumbuhan PAD terendah terdapat di Kabupaten Ketapang dengan pertumbuhan sebesar 7,47% per tahun.

Menurut kajian fiskal regional Kalimantan Barat tahun 2022, implementasi UU HKPD dan aturan turunannya memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan penerimaan daerah yang lebih baik di Kalimantan Barat. Sebelum adanya UU HKPD, terdapat permasalahan dalam

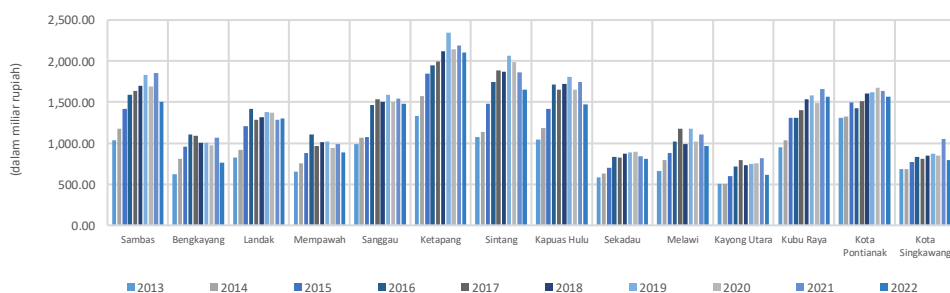
regulasi dan pelaksanaan penerimaan daerah, yang mengakibatkan potensi pendapatan daerah belum optimal dimanfaatkan. Setelah adanya UU HKPD, terjadi peningkatan dalam pengaturan dan pengelolaan penerimaan daerah, memungkinkan daerah untuk lebih efektif dan efisien dalam mengelola pendapatan dari berbagai jenis pajak, retribusi, dan lainnya.

Namun, terkait dengan PDRD, masih ada beberapa permasalahan dasar hukum yang perlu diatasi. Salah satunya bahwa undang-undang yang mengatur jenis PDRD tertentu, seperti pajak investasi, hotel, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Studi yang dilakukan oleh Ninuk Dwiastuti (2018) mengungkapkan bahwa guna meningkatkan PAD, diperlukan kebijakan-kebijakan daerah yang mengatur aspek-aspek hukum terkait. Langkah ini penting guna memastikan bahwa penggunaan pendapatan asli daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dapat terlaksana dengan efektif, sehingga dapat mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Jenis-jenis PDRD seperti BPHTB, pajak hotel, dan pajak investasi merupakan sumber potensial

Grafik 2 Tren Belanja Daerah Kabupaten/Kota Lingkup Kalimantan Barat Tahun 2013-2022



Sumber: LRA Pemda Kab/Kota Kalimantan Barat, SIKD DJPK (diolah peneliti)

pendapatan bagi daerah. Sementara itu, BPHTB ialah pengenaan pajak pada perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui berbagai transaksi seperti jual beli, hibah, tukar menukar, hadiah, atau metode lainnya. Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan pada keuntungan dari bisnis hotel, penginapan, atau tempat penginapan lainnya. Sedangkan pajak investasi adalah pengenaan pajak atas perolehan penghasilan dari kegiatan investasi di daerah, seperti pajak atas keuntungan perusahaan atau pajak atas penghasilan individu dari investasi dalam bentuk dividen atau bunga.

Tren Belanja Daerah Kalimantan Barat Tahun 2013-2022

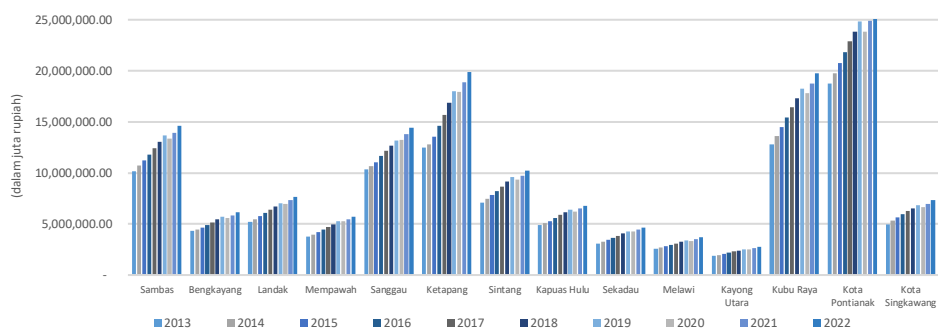
Belanja Daerah dalam APBD pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Barat pada tahun 2013-2022 cenderung fluktuatif seperti pada Grafik 2. Rata-rata belanja daerah Kalimantan Barat tahun 2013-2022 adalah sebesar Rp1.239,92 miliar, dengan rata-rata belanja tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp1.403,24 miliar. Rata-rata

belanja daerah tertinggi di Kalimantan Barat selama kurun waktu 2013-2022 terdapat di Kabupaten Ketapang yaitu sebesar Rp1.960,29 miliar per tahun dan terendah di Kabupaten Kayong Utara dengan rata-rata pengeluaran belanja daerah sebesar Rp679,71 miliar per tahun.

Dalam APBD pemerintah daerah lingkup Kalimantan Barat 2013-2022, belanja daerah rata-rata meningkat sebesar 4,37% setiap tahun. Pertumbuhan tertinggi mencapai 17,95% pada tahun 2015 dan penurunan terkecil mencapai 10,93% pada tahun 2022. Kabupaten Kubu Raya memiliki pertumbuhan belanja daerah tertinggi sebesar 6,16% per tahun dari 2013 hingga 2022. Sedangkan rata-rata pertumbuhan belanja daerah terendah terdapat di Kota Pontianak dengan pertumbuhan sebesar 2,18% per tahun.

Menurut ketentuan terbaru dalam UU HKPD, batas maksimum pengeluaran untuk gaji pegawai, selain tunjangan guru, sebesar 30% dari APBD, sementara batas minimum pengeluaran untuk infrastruktur (belanja modal) yakni

Grafik 3 Tren PDRB ADHK Kabupaten/Kota Lingkup Kalimantan Barat Tahun 2013-2022



Sumber: BPS Kalimantan Barat (diolah peneliti)

40% dari Belanja Daerah. Ketentuan baru ini mengamanatkan untuk dilakukan penyesuaian dalam masa transisi selama 5 tahun sejak diterbitkannya UU HKPD.

PDRB Kalimantan Barat Tahun 2013-2022

PDRB yang menggambarkan nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah pada satu tahun secara keseluruhan sering dijadikan sebagai ukuran produktivitas suatu daerah. Secara umum kinerja perekonomian di suatu daerah dicerminkan dari total nilai PDRB. Antara tahun 2013 dan 2022, PDRB masing-masing kabupaten/kota Kalimantan Barat meningkat rata-rata sebesar 4,36% per tahun seperti pada Grafik 3. Ini adalah peningkatan sebesar Rp9.051,79 miliar. Pertumbuhan PDRB tertinggi terdapat di tahun 2017 dengan pertumbuhan positif sebesar 5,57%, sementara pertumbuhan terendah terdapat pada tahun 2020 yaitu berkontraksi (tumbuh negatif) sebesar 1,79%.

Rata-rata PDRB tertinggi selama tahun 2013-2022 terdapat pada Kota Pontianak, yaitu sebesar Rp22.746,96 miliar per tahun, disusul oleh Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Ketapang. Sementara rata-rata PDRB tahunan terendah selama periode 2013-2022

terdapat di Kabupaten Kayong Utara dengan nilai PDRB sebesar Rp2.324,13 miliar per tahun. Sementara rata-rata pertumbuhan PDRB tertinggi selama kurun waktu 2013-2022 adalah Kabupaten Ketapang, yang tumbuh sebesar 5,34% per tahun disusul oleh Kabupaten Kubu Raya (4,97%) dan Kabupaten Mempawah (4,85%).

Pemilihan Model Terbaik

Suatu model ekonometrika yang menggunakan kombinasi data runut waktu dan data silang dalam modelnya dan kemudian dilakukan estimasi atas model yang melibatkan kedua data tersebut maka model tersebut merupakan model data panel (Wahyudi, 2020). *Common effect model* (CEM), *fixed effect model* (FEM), dan *random effect model* (REM) adalah beberapa model yang dihasilkan dari analisis data panel. Model-model ini dipertimbangkan karena masing-masing menawarkan cara yang berbeda untuk menunjukkan korelasi antara variabel dependen dan independen dalam data panel.

Untuk memperoleh model data panel terbaik di antara ketiganya, diperlukan prosedur pengujian model terbaik. Uji Chow dilakukan untuk menentukan CEM atau FEM yang paling sesuai untuk digunakan, dan hasilnya disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1 Hasil Uji Chow

<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	32.476964	(13,124)	0.0000
<i>Cross-section Chi-square</i>	207.578647	13	0.0000

Sumber: Diolah Peneliti

Tabel 2 Hasil Uji Hausman

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section random</i>	6.503289	2	0.0387

Sumber: Diolah Peneliti

Probabilitas *chi-square* dari hasil pengujian pada Tabel 1 < 0,05, yaitu sebesar 0,0000. Akibatnya, H0 ditolak dan model FEM adalah model yang terpilih. Selanjutnya, uji Hausman dilakukan untuk menentukan anatar REM dan FEM sebagai model terbaik.

Hasil uji Hausman disajikan dalam Tabel 2.

H0 ditolak karena probabilitas uji Hausman menunjukkan angka 0,0387 < 0,05. Oleh karena itu, model FEM adalah yang terbaik. Berikutnya, uji asumsi klasik dilakukan guna memastikan

Tabel 3 Uji Multikolinearitas

<i>Variable</i>	<i>Coefficient Variance</i>	<i>Uncentered VIF</i>	<i>Centered VIF</i>
C	1.61E+20	8.781766	NA
PDRB	996423.0	5.878055	1.799407
BELANJA	0.000177	15.44893	1.799407

Sumber: Diolah Peneliti

Tabel 4 Uji Heteroskedastisitas: Breusch-Pagan-Godfrey

Prob. F(2,137)	0.0000
Prob. Chi-Square(2)	0.0000
Prob. Chi-Square(2)	0.0000

Sumber: Diolah Peneliti

Tabel 5 Uji Autokorelasi: Breusch-Godfrey LM Test

Prob. F(2,135)	0.0000
Prob. Chi-Square(2)	0.0000

Sumber: Diolah Peneliti

Tabel 6 Hasil Uji Regresi REM

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	-6.36E+10	1.70E+10	-3.752735	0.0003
PDRB	16442.77	1914.660	8.587827	0.0000
BELANJA	0.031540	0.012227	2.579484	0.0109

Effects Specification

Cross-section random	4.58E+10	0.7648
Idiosyncratic random	2.54E+10	0.2352

Weighted Statistics

<i>R-squared</i>	0.633000	<i>Mean dependent var</i>	2.01E+10
<i>Adjusted R-squared</i>	0.627642	<i>S.D. dependent var</i>	4.23E+10
<i>S.E. of regression</i>	2.58E+10	<i>Sum squared resid</i>	9.12E+22
<i>F-statistic</i>	118.1483	<i>Durbin-Watson stat</i>	1.603802
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000000		

Unweighted Statistics

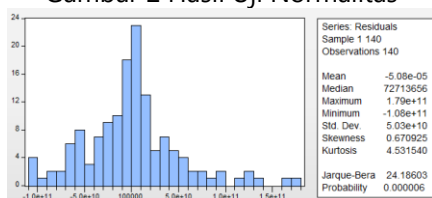
<i>R-squared</i>	0.692485	<i>Mean dependent var</i>	1.16E+11
<i>Sum squared resid</i>	4.21E+23	<i>Durbin-Watson stat</i>	0.347942

Sumber: Diolah Peneliti

bahwa tidak ada gangguan yang memengaruhi hasil estimasi, sehingga hasil pengujian yang dilakukan dapat dianggap valid untuk proses interpretasi. Untuk menentukan integritas model yang digunakan dan keabsahan hasil analisis regresi, uji asumsi klasik termasuk normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

Uji Normalitas

Gambar 2 Hasil Uji Normalitas



Sumber: Diolah Peneliti

Berdasarkan Gambar 2, nilai probabilitas kurang dari 0,05 atau ($0,000006 < 0,05$). Hal tersebut mengindikasikan *error term* yang tidak berdistribusi normal dalam penelitian ini.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3 menunjukkan hasil <10 untuk nilai *Variance Inflation Factors* (VIF) sehingga tidak ditemukannya masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji Tabel 4 menunjukkan terdapat masalah heteroskedastisitas karena nilai *Obs*R-squared* 0,0000 lebih kecil dari $\alpha = 5\%$.

Uji Autokorelasi

Dari Tabel 5, nilai *p-value* yang dihasilkan dari metode *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM*, yaitu sebesar $0,0000 < 0,05$, membuat H_0 ditolak. Artinya, masih terdapat masalah autokorelasi.

Berdasarkan uji asumsi klasik yang dilakukan, masih ditemukan masalah heteroskedastisitas, autokorelasi, dan data yang digunakan tidak berdistribusi normal. Masalah terkait uji asumsi klasik dapat diatasi menggunakan metode *Generalized Least Square* (GLS) (Rosadi, 2012). Beberapa literatur juga menyebutkan bahwa REM dengan metode GLS dapat mengatasi masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi, sehingga pengujian yang diperlukan hanya terkait masalah multikolinearitas (Gujarati, 2013). Sedangkan dalam penelitian ini, tidak ditemukan masalah multikolinearitas. Oleh karena itu, model panel data yang akan digunakan ialah REM.

Hasil Regresi Linier Berganda

Persamaan yang terbentuk dari Tabel 6 ialah sebagai berikut:

$$PAD_{it} = (\beta_0 + \alpha_{it}) + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_1 + e$$

atau

$$PAD_{it} = (-63.600.000.000 + \alpha_{it}) + 16.442.770.000 PDRB_{it} + 0,031540 BELANJA_{it} + e$$

Keterangan:

PAD_{it} Pendapatan Asli Daerah pada Pemda ke-*i* pada tahun ke-*t*

α_{it} Cross section random (unobserved factor) (Tabel 7)

β dan β_0 Konstanta = -63.600.000.000 artinya apabila variabel total PDRB bernilai konstan, maka PAD menurun sebesar -63.600.000.000 Rupiah.

β dan β_1 Koefisien regresi untuk $X_1 = 16442,77$, artinya apabila variabel PDRB mengalami perubahan 1 rupiah maka nilai PAD akan meningkat sebesar 16.442.770.000 rupiah.

β_2 Koefisien regresi untuk $X_2 = 0,031540$, artinya apabila

e variabel BELANJA mengalami perubahan 1 rupiah maka nilai PAD akan meningkat sebesar 31,540 rupiah.
error

Koefisien *intercept* dalam model sebesar $-6.36E+10 + \alpha_{it}$ menunjukkan apabila tidak terjadi perubahan PDRB maka PAD masing-masing kabupaten/kota adalah sebesar $-6.36E+10$ ditambah dengan konstanta α_{it} yang nilainya berbeda antara kabupaten/kota yang ditunjukkan pada Tabel 7.

Tabel 7 *Cross-Section Random*

No	CROSSID	Effect
1	Kab Sambas	-5.12E+10
2	Kab Bengkayang	1.40E+09
3	Kab Landak	5.86E+09
4	Kab Mempawah	4.12E+10
5	Kab Sanggau	-5.93E+10
6	Kab Ketapang	-6.41E+10
7	Kab Sintang	1.24E+10
8	Kab Kapuas Hulu	88098911
9	Kab Sekadau	2.37E+10
10	Kab Melawi	2.38E+10
11	Kab Kayong Utara	3.17E+10
12	Kab Kubu Raya	-9.56E+10
13	Kota Pontianak	5.99E+10
14	Kota Singkawang	7.03E+10

Sumber: Diolah Peneliti

Pengujian regresi berganda mencakup sejumlah metode evaluasi, termasuk pemeriksaan *R-squared*, uji signifikansi-*F*, dan uji *t-statistics*. Uji signifikansi-*F* dimaksudkan untuk menilai dampak variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Dari hasil uji regresi menggunakan model REM, didapati bahwa probabilitas *F-statistics* sebesar 0,000000 atau 0% yang kurang dari nilai α sebesar 5%. Interpretasi atas hasil tersebut ialah bahwa secara bersama-

sama, variabel PDRB dan variabel belanja daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD.

Dampak variabel independen secara individu atau parsial pada variabel dependen juga diukur dengan uji signifikansi-*t*. PDRB memiliki probabilitas di bawah 0,05 atau 0,0000, jika dilihat secara individu atau parsial berdasarkan hasil uji signifikansi-*t*. Interpretasi atas hasil uji tersebut ialah bahwa PDRB memiliki pengaruh signifikan pada PAD. Namun, variabel belanja daerah juga memiliki probabilitas *t*-statistik sebesar 0,0109 atau kurang dari 0,05. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa variabel belanja pemerintah juga memengaruhi PAD.

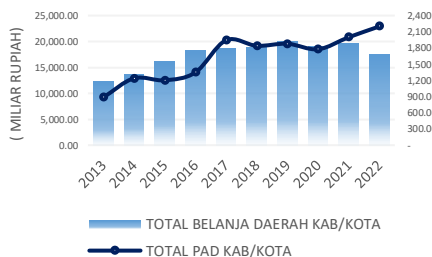
Variabel PDRB dan total belanja daerah dapat bertanggung jawab atas 63,3% variasi model, menurut nilai *R-squared*. Variabel tambahan yang tidak termasuk dalam model penelitian ini memberikan kontribusi sekitar 36,7%.

Pembahasan: Pengaruh Belanja Daerah terhadap PAD Kalimantan Barat

Dalam uji yang dilakukan, ditemukan bahwa belanja daerah atau pengeluaran pemerintah daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap PAD. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 6, yaitu nilai koefisien signifikansi *t* belanja daerah sebesar 0,0109 atau di bawah 0,05. Temuan dari pengujian tersebut konsisten dengan studi sebelumnya yang dilaksanakan oleh Zahari (2017) terkait dampak atas pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Studi tersebut menegaskan bahwa belanja

yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Penelitian lain oleh Ramadhan & Syahidin (2020) menunjukkan hasil serupa yaitu belanja yang dikeluarkan pemerintah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PAD di Kabupaten Aceh Tengah.

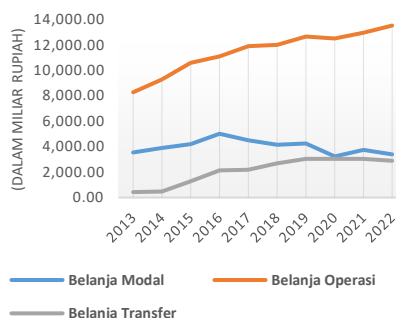
Grafik 4 Tren Total Belanja Daerah dan PAD Kabupaten/Kota Lingkup Kalimantan Barat Tahun 2013-2022



Sumber: LRA Pemda Kab/Kota Kalimantan Barat, SIKD DJPK & BPS Kalimantan Barat (diolah)

Sejak tahun 2013 hingga 2022, total belanja daerah konsolidasian seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat cenderung mengalami fluktuasi, sementara total PAD Kalimantan Barat cenderung naik selama periode tersebut. Jika diperhatikan pada Grafik 4, total belanja daerah sejak tahun 2013 hingga 2016 memiliki tren positif yang sejalan dengan tren PAD. Sedangkan pada tahun 2017 hingga 2021, total belanja daerah cenderung stagnan dan menurun pada tahun 2022. Hal tersebut dapat disebabkan oleh pergerakan dinamika pemerintahan yang turut berpengaruh pada total belanja pemerintah yang selanjutnya memengaruhi PAD di Kalimantan Barat, seperti perubahan kebijakan, terjadinya resesi, dan pandemi. Berdasarkan hasil

Grafik 5 Tren Proporsi Belanja Daerah Tahun 2013-2022



Sumber: LRA Pemda Kab/Kota Kalimantan Barat, SIKD DJPK & BPS Kalimantan Barat (diolah)

Kajian Fiskal Regional (KFR) Kalimantan Barat Tahun 2022 seperti Grafik 5, selama tiga tahun terakhir (2020-2022), belanja operasi memiliki proporsi paling

besar dari total belanja di Provinsi Kalimantan Barat secara konsolidasian dari seluruh kabupaten/kota. Proporsi belanja terbesar kedua adalah belanja transfer dan terbesar ketiga adalah belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD. Hal ini diakibatkan oleh adanya efek *multiplier* dari belanja yang direalisasikan, yaitu setiap unit uang yang diinvestasikan atau dibelanjakan oleh pemerintah daerah akan menciptakan pengeluaran tambahan dalam perekonomian daerah. Pengeluaran tambahan dalam perekonomian daerah tersebut akan meningkatkan kontribusi ekonomi dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan daerah. Peningkatan alokasi dana pemerintah daerah untuk sektor-sektor seperti infrastruktur, layanan publik, dan pengembangan ekonomi menciptakan siklus ekonomi di mana

pendapatan tambahan bagi berbagai pihak, seperti kontraktor, pekerja, dan usaha lokal, berkontribusi pada pendapatan daerah.

Secara spesifik, hasil penelitian Iskandar (2012) menunjukkan bahwa kombinasi pengeluaran modal dan pengeluaran untuk barang dan jasa berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional serta independensi fiskal yang tercermin dalam peningkatan PAD. Belanja modal memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan PAD dibandingkan dengan belanja operasional. Hal ini dapat dijelaskan karena belanja modal, yang terutama digunakan untuk investasi dalam infrastruktur dan proyek pembangunan jangka panjang, cenderung memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan tambahan di masa depan.

Pembahasan: Pengaruh PDRB terhadap PAD Kalimantan Barat

Berdasarkan hasil regresi linear berganda pada Tabel 6, PDRB berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kalimantan Barat. Hasil serupa juga ditunjukkan pada penelitian Juliansyah & Sulkadria (2018), yakni PDRB memberikan pengaruh positif dan signifikan pada PAD. Selanjutnya penelitian yang dilakukan (Muid, 2015) juga menunjukkan dengan adanya peningkatan PDRB dalam perekonomian akan berdampak pada meningkatnya kegiatan perekonomian di wilayah tersebut dan secara otomatis akan menambah pendapatan daerahnya.

Pengaruh signifikan dari PDRB terhadap pendapatan pada suatu wilayah secara keseluruhan menyiratkan

bahwa PDRB yang semakin besar pada suatu wilayah maka semakin besar pula kontribusinya terhadap pendapatan pada daerah tersebut, khususnya pos pendapatan pajak dan retribusi daerah. Tingginya PDRB mencerminkan tingginya aktivitas di daerah tersebut. Hal ini sejalan dengan kondisi perekonomian di Kalimantan Barat, di mana penopang terbesar perekonomian di Kalimantan Barat masih berasal dari sektor sumber daya alam mentah, di tengah upaya pemerintah untuk mendorong industrialisasi. Oleh karena itu, daerah-daerah di Kalimantan Barat yang memiliki kawasan pengolahan sumber daya alam mentah (pertambangan dan penggalian) memiliki rata-rata nilai PDRB dan penerimaan PAD yang cukup tinggi, seperti Kabupaten Kubu Raya dan Ketapang.

Di samping sektor sumber daya alam mentah, selama dekade terakhir (2013-2022), terdapat lima kategori lapangan usaha yang mendominasi struktur ekonomi Kalimantan Barat. Kelima kategori melibatkan sektor-sektor seperti kehutanan, perikanan, dan pertanian; konstruksi; industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran, beserta reparasi kendaraan bermotor; dan pertambangan dan penggalian. Dalam konteks ini, daerah perkotaan seperti Kota Pontianak dan Kota Singkawang terlihat mendominasi dan menunjukkan kinerja yang kuat, khususnya dalam sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi kendaraan bermotor, industri pengolahan, dan konstruksi. Hal ini berdampak positif pada PDRB dan PAD daerah tersebut,

yang juga mencapai tingkat yang signifikan.

Sejalan dengan nilai PDRB di Kalimantan Barat yang terus mengalami peningkatan, PAD di Kalimantan Barat juga terus mengalami kenaikan. Berdasarkan tren realisasi selama tiga tahun terakhir (2020-2022), tiga komponen pendapatan daerah yaitu PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (LLPDyS) mengalami kenaikan secara konsisten. Kenaikan signifikan PAD di tahun 2017 salah satunya dipengaruhi oleh transisi pengalihan pajak atas bumi dan/atau bangunan (PBB-P2) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Salah satu pilar dalam UU HKPD adalah untuk memperkuat *local taxing power* (LTP) di daerah. Kebijakan yang diambil pemerintah dalam meningkatkan PDRD merupakan bagian integral pilar UU HKPD dalam mewujudkan pemerataan layanan publik dan kesejahteraan. Mengetahui bahwa secara signifikan PDRB di suatu daerah dapat meningkatkan penerimaan PAD, maka upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian di suatu daerah juga merupakan upaya dalam mewujudkan penerimaan PDRD yang andal dan *sustainable* sebagai sumber pendanaan pembangunan. Pemerintah juga perlu memperhatikan dan waspada apabila perekonomian suatu daerah cenderung stagnan (PDRB konstan), karena hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar $-6.63E+10$. Hal ini menandakan bahwa jika PDRB dianggap konstan maka akan menurunkan PAD sebesar Rp63.3 miliar.

Pengaruh Aktivitas Ekonomi (Industrialisasi) ke Peningkatan PAD

Sektor industri pengolahan menjadi salah satu sektor di Kalimantan Barat dengan pertumbuhan yang relatif lebih cepat dibandingkan sektor lainnya, sektor industri pengolahan justru memiliki kontribusinya relatif lebih kecil daripada sektor ekonomi yang sama di tingkat nasional (Rosyadi, 2022). Sejalan dengan itu, penelitian oleh Susilawati et al. (2019), menyatakan bahwa sektor industri pengolahan juga merupakan sektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan di Kalimantan Barat.

Pada tiga tahun terakhir (2020-2022) PDRB Kalimantan Barat tidak menunjukkan perubahan signifikan. Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi sektor yang mendominasi perekonomian di Kalimantan Barat, diikuti oleh industri pengolahan, konstruksi dan perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor. Secara umum, pada tahun 2022, perekonomian Provinsi Kalimantan Barat didominasi oleh enam sektor kegiatan ekonomi, meliputi pertanian, kehutanan, perikanan, industri manufaktur, perdagangan grosir & eceran, perbaikan mobil dan sepeda motor, konstruksi, pertambangan & ekstraksi, serta administrasi pemerintahan dan pertahanan, jaminan sosial.

Dikutip dari kajian fiskal regional Kalimantan Barat Tahun 2022, Eddy Suratman menjelaskan bahwa sektor sumber daya alam mentah masih menjadi pendorong utama ekonomi Kalimantan Barat, meskipun pemerintah berupaya mendorong industrialisasi. Pada saat ini, harga komoditas bauksit dan kelapa sawit sedang meningkat di kalangan masyarakat Kalimantan Barat.

Namun, keberlanjutan pertumbuhan sektor primer yang bergantung pada pertambangan dan perkebunan menjadi pertanyaan. Hal ini disebabkan oleh fluktuasi harga komoditas global yang diproyeksikan akan mengalami penurunan antara tahun 2025 hingga 2030. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan efisiensi, produktivitas, dan nilai tambah untuk memfasilitasi transformasi struktural yang dibutuhkan. Salah satu alternatif yang dapat diambil adalah melalui reindustrialisasi, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang telah dimulai sejak tahun 2023.

Dalam kebijakan tersebut, pemerintah berencana menerapkan kebijakan untuk menghentikan ekspor sejumlah komoditas mentah, seperti bauksit, dengan tujuan mendorong aktivitas pengolahan di dalam negeri sebelum produk tersebut diekspor dalam bentuk setengah jadi atau barang jadi. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja lokal serta memperkuat sektor industri nasional. Kebijakan tersebut juga dalam rangka mengurangi ketergantungan Indonesia pada pasar global dan meningkatkan ketahanan ekonomi dalam negeri terhadap fluktuasi harga komoditas internasional.

Namun perlu diperhatikan bahwa upaya ini harus didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur, akses listrik, sanitasi, dan air bersih, serta perbaikan kondisi jalan. Saat ini, rata-rata masa pendidikan masyarakat Kalimantan Barat masih rendah, sebagaimana tercermin dalam indeks pembangunan

manusia (IPM). Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk mengatasi kendala infrastruktur dan SDM diharapkan dapat mendukung pembangunan ekonomi Kalimantan Barat dan menarik investasi dalam pembangunan pabrik pengolahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan dari hasil penelitian serta analisis data yang telah dilakukan ialah adanya pengaruh signifikan secara simultan antara PDRB dan belanja daerah terhadap PAD. Secara parsial, baik PDRB maupun belanja daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap PAD.

Berdasarkan hasil uji regresi, probabilitas *t-statistics* sebesar 0,0000, kurang dari 0,05, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa PDRB mempunyai pengaruh yang signifikan pada peningkatan PAD. Nilai konstanta yang menunjukkan angka $-6,36E+10$ dapat diartikan jika PDRB konstan maka PAD akan turun sebesar Rp6,36 miliar. Sementara itu, koefisien regresi PDRB menunjukkan angka 16442.77 yang dapat diinterpretasikan dengan setiap penambahan Rp1 PDRB akan meningkatkan PAD sebesar Rp16,44 miliar. Selain itu, hasil uji *R-squared* menunjukkan bahwa variabel-variabel penelitian mampu menjelaskan model sebesar 63,30%. Sedangkan, 36,70% sisanya dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model.

Sementara itu, nilai koefisien signifikansi *t* belanja daerah sebesar 0,0109 atau di bawah 0,05 menunjukkan pengaruh parsial yang signifikan yang diberikan oleh belanja daerah pada peningkatan PAD. Hal tersebut

disebabkan oleh adanya efek *multiplier* dari belanja yang direalisasikan, yaitu setiap unit uang yang diinvestasikan atau dibelanjakan oleh pemerintah daerah akan menciptakan pengeluaran tambahan dalam perekonomian daerah. Pengeluaran tambahan dalam perekonomian daerah tersebut akan meningkatkan kontribusi ekonomi dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan daerah.

Dengan mempertimbangkan manfaat dan tujuan penelitian, hasil dari penelitian ini dapat memberikan implikasi positif bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam. Hasil penelitian juga dapat digunakan oleh pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang mendorong pertumbuhan PDRB dan kebijakan fiskal melalui belanja daerah dalam rangka peningkatan PAD. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

Pertama, untuk meningkatkan perekonomian di Kalimantan Barat, perlu dilakukan perubahan struktur perekonomian menjadi lebih produktif, salah satunya dengan melakukan industrialisasi guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan nilai tambah, serta untuk memberikan fasilitas pada transformasi struktural.

Kedua, selain transformasi ekonomi, Kalimantan Barat dapat memfokuskan pengembangan ekonomi dengan berbasis pada optimalisasi kawasan industri (KI) dan masing-masing sektor potensialnya, seperti Kawasan Metropolitan di Kota Pontianak, Kawasan Pelabuhan Sungai Kunyit yang fokus pada sektor industri, KI Tayan menitikberatkan pada sektor perkebunan, pertambangan, dan

industri, KI Semparuk memiliki fokus pada sektor pertanian dan industri, KI Tanjung Api terkait dengan sektor pertambangan, sementara KI Mandor menonjol dalam sektor kelapa sawit, karet, dan pertambangan.

Ketiga, pemerintah daerah dapat mengutamakan pembangunan ekonomi pada sektor-sektor yang menyumbang PDRD cukup tinggi tanpa mengabaikan sektor ekonomi lainnya, misalnya pengembangan sektor pariwisata dan industri yang berkontribusi langsung pada jenis PDRD BPHTB, pajak restoran, pajak penerangan jalan, dan pajak hotel. Keempat, pemerintah daerah harus segera mengimplementasikan UU HKPD secara penuh dengan menerbitkan peraturan daerah tentang pajak daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terutama terkait dengan pelaksanaan opsen, bagi hasil pajak daerah, dan insentif fiskal untuk kemudahan berusaha.

Kelima, dalam rangka meningkatkan PAD melalui perekonomian daerah (PDRB), investasi daerah perlu ditingkatkan. Suatu pendekatan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kontribusi investasi pemerintah adalah melalui restrukturisasi belanja operasional, khususnya dalam hal belanja barang dan belanja pegawai, dengan tujuan mengarahkannya ke belanja yang lebih produktif, seperti belanja modal.

Keenam, sesuai dengan amanat UU HKPD, pemerintah daerah dapat secara bertahap menyesuaikan proporsi belanja untuk memenuhi maksimum belanja pegawai 30% dan minimum belanja infrastruktur 40%.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Sejalan dengan maksud penelitian, hasil dari penelitian ini mempunyai beberapa implikasi yang dapat diterapkan dalam penelitian berikutnya yang lebih mendalam. Pemerintah dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk membuat rumusan terkait kebijakan ekonomi yang mendorong pertumbuhan PDRB dan kebijakan fiskal melalui belanja daerah dalam rangka peningkatan PAD. Implikasi praktis dalam temuan di penelitian ini adalah beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diambil atau dilakukan oleh pemerintah melalui instrumen fiskal pada pengaturan alokasi belanja daerah dan pengaturan kebijakan ekonomi dalam upaya peningkatan PDRB untuk meningkatkan PAD.

Model yang disusun dalam penelitian ini hanya mempertimbangkan PDRB dan belanja daerah sebagai variabel yang memengaruhi PAD, masih dimungkinkan adanya variabel lain yang memengaruhi PAD lebih signifikan namun tidak disertakan dalam analisis ini. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan mampu menginvestigasi variabel atau faktor-faktor lain yang memiliki pengaruh lebih signifikan terhadap peningkatan PAD.

Meskipun sudah banyak penelitian serupa yang dilakukan di berbagai daerah, upaya pengembangan dan penerapan atas penelitian ini masih terbatas. Oleh karena itu, diharapkan adanya pengembangan lebih lanjut dengan melihat dan membandingkan implementasi kebijakan khusus di daerah lainnya (*benchmarking*) sehingga

dapat memberikan pemahaman atas manajemen PAD di tingkat daerah dan hasil peningkatan PAD yang diperoleh.

Penelitian ini juga masih terbatas pada variabel yang bersifat kuantitatif. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan dengan memasukkan pertimbangan variabel kualitatif seperti fenomena sosial dan pergerakan dinamika pemerintahan yang turut berpengaruh pada PAD, terutama pada saat-saat tertentu yang memengaruhi perubahan struktur ekonomi masyarakat, seperti saat pemerintah menerapkan kebijakan baru, adanya fenomena tidak biasa seperti pandemi atau krisis ekonomi, dan fenomena puncak tahun politik.

Selain itu, dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan PAD, penting bagi otoritas untuk melibatkan dimensi yang lebih luas selain pertimbangan ekonomi dan fiskal semata. Perhatian terhadap dampak sosial dan lingkungan juga harus menjadi bagian integral dari proses pengambilan keputusan. Sebagai contoh, ketika mendorong pengembangan kawasan ekonomi industri, perlu dipertimbangkan bagaimana kebijakan tersebut akan berdampak pada lingkungan sekitar. Selain itu, fokus hanya pada peningkatan PAD juga perlu diimbangi dengan pertimbangan terhadap dampak jangka panjang terhadap perekonomian secara keseluruhan. Sebagai alternatif, mungkin pemerintah dapat mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan konsekuensi PAD yang rendah dalam 5-10 tahun pertama. Contohnya, kebijakan pajak dapat diarahkan untuk

menciptakan dampak positif jangka panjang pada perekonomian, bukan hanya mencari keuntungan dalam waktu cepat. Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, kebijakan publik memiliki potensi untuk menjadi lebih berkelanjutan dan memberikan dampak yang lebih merata terhadap masyarakat dan ekosistem.

REFERENSI

- Arsyad, L. (1992). *Ekonomi pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Dwiastuti, N. (2018). Efektivitas penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Prosiding Seminar Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 224-237.
- Gujarati, D. (2003). *Ekonometrika dasar*. Terjemah Sumarno. Zein. Jakarta: Erlangga.
- Iskandar, M. A. (2012). *Pengaruh belanja modal, dana perimbangan, dan kemandirian fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Studi empiris pada pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa periode 2006-2010)*. Skripsi pada Universitas Indonesia.
- Juliansyah, H. & Sulkadria. (2018). Pengaruh total penduduk dan produk domestik regional bruto terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Simeulue. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 1, 58-64.
- Muid, A. (2015). *Pengaruh produk domestik regional bruto dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah (Studi kasus di Kabupaten Gresik tahun 1994-2013)*. Skripsi pada Universitas Brawijaya Malang.
- Purnomo, M. E. (2015). *Pengaruh realisasi belanja daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (Studi pada kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat)*. Skripsi pada Universitas Brawijaya Malang.
- Ramadhan, M. & Syahidin. (2020). Pengaruh pengeluaran pemerintah dan dana perimbangan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Tengah. *Gajah Putih Journal of Economics Review (GPJER)*, 2(2). 01-10.
- Rosadi, D. (2012). *Ekonometrika dan analisis runtun waktu terapan dengan eviews*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Rosyadi. (2022). Pemetaan daya saing daerah Provinsi Kalimantan Barat. *Prosiding Seminar Nasional Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 5, 202-211.
- Simanjuntak, T. (2001). *Analisis potensi pendapatan asli daerah, bunga rampai manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Susilawati, R. A. L., Arifin, Z., & Hadi, S. (2019). Analisis pengembangan potensi ekonomi di Kalimantan Barat Tahun 2014-2017. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(4), 665-680.
- Wahyudi, S. T. (2020). *Konsep dan penerapan ekonometrika menggunakan e-views*. Edisi Kedua. Depok: Rajawali Pers.
- Zahari, M. (2017). Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. *Ekonomis: Jurnal of Economics and Business*, 1(1), 180-196.